



KEBIJAKAN FISKAL

KEBIJAKAN FISKAL

- Kebijakan Fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
- Kebijakan fiskal atau politik fiskal : kebijakan yg
- berhubungan dengan pengeluaran dan penerimaan pemerintah.
- Pengeluaran pemerintah berpengaruh memperbesar pendapatan nasional (**expansionary**).
- Penerimaan pemerintah memperkecil pendapatan nasional (**contractionary**).
- Penerimaan pemerintah berupa **perpajakan bersifat lebih memperkecil pendapatan nasional dibanding pinjaman negara.**

ASAL MULA KEBIJAKAN FISKAL

- Kebijakan fiskal mulai dikenal pada 1930-an dan sesudahnya.
- Sebelum 1930-an : Pengeluaran pemerintah sebagai alat pembiayaan kegiatan pemerintah. Pajak hanya sebagai sumber pembiayaan pengeluaran negara.
- Masa 1930-an : depresi melanda perekonomian di AS dan dunia. Kebijakan moneter yg biasa dianjurkan untuk merangsang kegiatan individu atau sektor swasta menjadi kurang ampuh pada masa depresi di mana pengangguran dan deflasi terjadi.
- Keynes menerbitkan bukunya yg berjudul *The General Theory of Employment, Interest and Money* (1936).
- Buku ini merupakan dasar dari perkembangan teori kebijakan fiskal. Peranan pemerintah menjadi sangat penting sejak saat itu.

MACAM KEBIJAKAN FISKAL

- Kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam atas dasar :
 - 1. Pembiayaan fungsional.
 - 2. Pengelolaan anggaran.
 - 3. Stabilisasi anggaran otomatis.
 - 4. Anggaran belanja seimbang.

PEMBIAYAAN FUNGSIONAL AP.LERNER

- Dalam pembiayaan fungsional, pengeluaran pemerintah ditentukan dgn melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional.
- Pajak untuk mengatur mengatur pengeluaran swasta, **bukan utk meningkatkan penerimaan pemerintah.**
- Peningkatan pajak sama sekali tidak diperlukan dalam masa pengangguran.
- Pinjaman publik - alat menekan inflasi.
- Pengeluaran pemerintah dan perpajakan dipertimbangkan sebagai suatu hal terpisah.

PENGELOLAAN ANGGARAN – ALVIN HANSEN

- Dalam pengelolaan anggaran, pengeluaran pemerintah, perpajakan dan pinjaman dimaksudkan untuk mencapai kestabilan ekonomi.
- Hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan penerimaan pemerintah selalu dipertahankan sehingga suatu saat dapat terjadi defisit atau surplus.
- Penggunaan anggaran belanja seimbang untuk jangka panjang diperlukan, dengan catatan :
 - masa depresi - ditempuh anggaran belanja defisit (pengeluaran pemerintah diperbesar).
 - masa inflasi - ditempuh anggaran belanja surplus (penerimaan pemerintah diperbesar).

STABILISASI ANGGARAN

- Dengan stabilisasi otomatis, pengeluaran pemerintah akan ditentukan berdasar perkiraan manfaat dan biaya dari berbagai macam program. Pajak akan ditentukan sehingga akan menimbulkan surplus dalam periode kesempatan kerja penuh. Ada kemunduran kegiatan usaha - program pemerintah dan perpajakan tidak diubah, namun penerimaan pajak akan turun. Pengeluaran pemerintah meningkat terutama yg dikaitkan dengan gaji, pensiun, bantuan sosial. Akibatnya defisit dalam anggaran belanja pemerintah muncul dan mendorong perkembangan sektor swasta kembali sampai tercapainya kesempatan kerja penuh.
- Dalam masa inflasi - ada kenaikan dalam penerimaan pemerintah terutama dari pajak pendapatan dan tidak perlu terlalu banyak tunjangan pengangguran sehingga akan ada surplus anggaran belanja.

ANGGARAN BELANJA SEIMBANG

- Suatu modifikasi pembelanjaan atas dasar anggaran yg disesuaikan keadaan (managed budget).
- Seimbang dalam jangka panjang, tetapi ditempuh defisit pada masa depresi dan surplus pada masa inflasi.
- Dalam masa depresi, pengeluaran perlu ditingkatkan dan diikuti pula dengan peningkatan penerimaan sehingga tidak akan memperbesar hutang negara.

TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL

- 1. Pertumbuhan ekonomi yang layak
- 2. Mengurangi pengangguran
- 3. Menstabilkan harga

STRUKTUR PAJAK YANG BAIK

- 1. Perolehan (*yield yield*)) harus memadai
- 2. Distribusi beban pajak (*tax burden burden*)) harus adil
- 3. Beban akhir pajak harus jelas
- 4. Tidak menghasilkan beban lebih (*burdens excess burdens*)
- 5. Menunjang upaya stabilisasi dan pertumbuhan
- 6. Adil dan mudah secara administratif
- 7. Biaya administrasi dan penegakan aturan (*compliance compliance*)) tidak boleh terlalu tinggi

KLASIFIKASI PAJAK

- a. Pajak Obyektif : pajak yang dikenakan berdasarkan aktivitas ekonomi para wajib pajak.
- b. Pajak Subyektif : pajak yang dipungut dengan melihat kemampuan wajib pajak.
- c. Pajak Langsung : beban pajak yang tidak dapat digeser kepada wajib pajak lain
- d. Pajak tidak Langsung : beban pajak yang dapat digeser kepada wajib pajak lain

TARIP PAJAK

- 1. Pajak Nominal : pajak yang pengenaannya berdasarkan sejumlah nilai nominal tertentu.
- 2. Pajak Prosentase : pajak yang pengenaannya berdasarkan persentase tertentu dari dasar pengenaan pajak.
 - a. Pajak Proporsional : tarif persentasenya tetap.
 - b. Pajak Progresif : tarif makin tinggi bila dasar pengenaan pajak makin tinggi.
 - c. Pajak Regresif : tarif makin rendah bila dasar pengenaan pajak makin tinggi.

- Kebijakan Menekan Pengeluaran
- Dilakukan dengan cara mengurangi pengeluaran konsumsi.
- Cara :
 - a. Meningkatkan pajak pendapatan.
 - b. Meningkatkan tingkat bunga.
 - c. Mengurangi pengeluaran pemerintah.

- Kebijakan Memindahkan Pengeluaran
- Cara :
- 1. Memaksa.
 - a. Mengenakan tarif dan atau kuota.
 - b. Mengawasi pemakaian valuta asing.
- 2. Rangsangan.
 - a. Ekspor : mengurangi pajak komoditi ekspor, menyederhanakan prosedur ekspor, memberantas pungli dan biaya siluman.
 - b. Menstabilkan harga dan upah di dalam negeri.
 - c. Melakukan devaluasi